

Editor

Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P



SEKOLAH KADER PENGAWAS

PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH
BADAN PENGAWAS PEMILU



Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P
Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P

Tentang Penulis



Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P.

Lahir di Kotamobagu, 30 April 1977. Adalah dosen tetap di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Administrasi Negara Universitas Negeri Manado. Bergelar Sarjana (S1) Hukum Islam IAIN Manado, Magister (S2) Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, dan Doktor (S3) Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar.

Pernah mengikuti pendidikan Short Course on Social Science Research Methodology Northern Illinois University Dekalb Chigago USA dan International Journal of Academic Research (Thomson ISI Knowledge): The Professionalism of Regional Electoral Commission. Selain aktif mengajar dan meneliti, juga aktif dalam organisasi, antara lain: Wakil Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI SULUT) dan Wakil Ketua Aisiyah Sulut, Selain itu, dari tahun 2011 - sekarang, sangat aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan Pemilu dan Birokrasi Pemerintahan. Antara lain, tahun 2023 ini, menjadi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Narasumber TVRI Perempuan dan Pemilu 2024, dan Fasilitator Nasional Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.



Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P.

Lulus gelar Sarjana (S.P) pada tahun 2006 dan memperoleh gelar Magister bidang Administrasi Publik (M.A.P) tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Sulut. Selain itu, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 PW Fatayat NU Sulut PMII.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF TINGKAT MENENGAH BADAN PENGAWAS PEMILU

Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P.
Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF TINGKAT
MENENGAH BADAN PENGAWAS PEMILU**

Penulis : Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P.
Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P.

Editor : Brain Fransisco Supit, S.E., M.A.P.

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-623-151-983-2

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku referensi ini dengan judul “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah Badan Pengawas Pemilu” dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian hingga penyusunan buku ini. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para dosen, praktisi, dan peneliti yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menunjang penyelesaian buku ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam karya buku ini. Oleh karena itu, masukan, koreksi dan saran dari pembaca dibutuhkan dalam rangka perbaikan di kemudian hari.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan inspirasi kepada pembaca. Selamat membaca.

Penulis,

Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P
Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK: KONSEP & IMPLEMENTASI.....	8
A. Konsep Kebijakan Publik.....	8
B. Proses Perumusan Kebijakan Publik	11
C. Implementasi Kebijakan Publik	13
D. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	14
E. Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	21
F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	22
BAB 3 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU).....	29
A. Sejarah Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	29
B. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara.....	31
BAB 4 KONSEP SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF.....	34
A. Konsep dan Landasan Hukum	34
B. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah	38
C. Tujuan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ..	40
D. Harapan Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)	40
BAB 5 SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TINGKAT MENENGAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA	42
A. Pelaksanaan Program.....	42
B. Pembangunan Karakter	56
C. Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Pengawasan.....	57
D. Penegakan Hukum Pemilu.....	59
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF	63
A. Komunikasi	67
B. Sumber Daya.....	70
C. Disposisi	73

D. Struktur Birokrasi.....	75
BAB 7 FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI SKPP	
TINGKAT MENENGAH	77
A. Sumber Daya	78
B. Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	79
C. Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi Terkait...	79
D. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	80
E. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.....	82
F. Faktor Lainnya	83
BAB 8 PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
TENTANG PENULIS	91



**SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF TINGKAT
MENENGAH BADAN PENGAWAS PEMILU**

Penulis :

Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P.

Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P.



BAB

1

PENDAHULUAN

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai suksesi kekuasaan dan rekrutmen politik secara reguler. Penguatan masyarakat sipil juga menjadi isu penting di dalam pembangunan politik terutama di Negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Walau demikian, pemilu sebagai upaya pelembagaan demokrasi bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 2008). Selain pemilu, pelembagaan demokrasi juga dapat diperkuat dengan menerapkan apa yang disebut sebagai electoral governance dimana mekanisme ini membuka peluang lebar akan keterlibatan actor/ lembaga non Negara termasuk organisasi masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, akademisi, media, NGO, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Pelembagaan fungsi kontrol ini muncul akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 1971, yakni manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas persoalan itu, perundang-

BAB 2

KEBIJAKAN PUBLIK: KONSEP & IMPLEMENTASI

A. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan atau biasa disebut “Policy” oleh James Anderson dalam (Kadir, 2020) menyatakan bahwa “Kebijakan Publik digunakan untuk melihat tindakan aktor misalnya seorang pejabat suatu kelompok, maupun organisasi pemerintah dalam bidang tertentu. Definisi lain dikemukakan oleh Eyestone dalam (Kadir, 2020:3) yang mengatakan bahwa “kebijakan Publik diartikan sebagai hubungan dari pemerintah dengan lingkungannya”. Pengertian yang ditawarkan Eyestone ini memberikann arti yang sangat luas dan masih belum pasti hal ini dikarenakan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Adapun pendapat Thomas R Dye (Dye,1975;1) yang mengatakan Bahwa Kebijakan umum adalah pilihan bagi pemerintah untuk melaksanakan ataupun tidak dilaksanakan suatu keputusan spesifik kalimat nya lebih memberikan gambaran bahwa apa yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan berarti itulah kebijakan. Kendati suatu hal yang menurut kita seharusnya dilakukan tapi jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan berarti itulah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Carl Friedrick (Kadir, 2020:4) Menyebutkan bahwa Ia melihat kebijakan sebagai aksi yang diajukan oleh individu, group atau pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang

BAB 3

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

A. Sejarah Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi

BAB 4

KONSEP SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF

A. Konsep dan Landasan Hukum

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah sebuah gerakan yang diinisiasi Bawaslu sebagai media pendidikan masyarakat untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang berintegritas. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman akan tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga memiliki dampak keterlibatan yang begitu tinggi dari masyarakat. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah setiap peserta mampu memahami konten dan konteks dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tercantun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perwabaslu). Peserta juga harus mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dalam Pemilu dan Pilkada serta persiapan dan pelaksanaan dalam proses penyelenggaraan pengawasan. selain itu, peserta mampu memahami peran pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder yakni Bawaslu sendiri, peserta pemilu dan masyarakat.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan menjadi aktor pengawasan partisipatif dan pengerak masyarakat untuk aktif berperan dan mengawasi proses tahapan Pemilu dan Pilkada. Pilihan-pilihan metode pengawasan yang berbasis teknologi informasi termasuk media sosial menjadi ruang terbuka dan efektif untuk peserta ketahui dalam kegiatan ini.

BAB 5

SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) TINGKAT MENENGAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selama 5 hari. Adapun Peserta yang mengikuti kegiatan SKPP tingkat menengah ini merupakan peserta-peserta yang telah terseleksi secara objektif dengan indikator penilaian yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Tujuan daripada kegiatan SKPP tingkat menengah ini adalah mencari kader-kader pengawas partisipatif yang aktif dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitardan mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang baik terkait dengan Pengawasan Pemilu, sekaligus melakukan seleksi kembali dari 35 orang menjadi 4 orang sebagai perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti SKPP Tingkat Lanjut. Acara ini berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan protap yang ada, sebelum memasuki ruang acara peserta dan seluruh tamu diwajibkan melakukan tes rapid antigen terlebih dahulu guna memastikan semua aman dari virus covid-19.

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selama 5 hari mulai tanggal 5-9 Oktober 2021 di Tasik-ria Resort Desa Mokupa, Kabupaten Minahasa ini merupakan kegiatan lanjutan daripada kegiatan SKPP tingkat dasar yang dilaksanakan pada bulan

BAB 6

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF

Implementasi kebijakan publik termasuk dalam tahapan Kebijakan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan suatu kebijakan tidak akan sempurna tanpa ada proses implementasi karena tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk di laksanakan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah.

Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting karena sesempurna bagaimanapun dari tahapan suatu kebijakan jika dalam implementasinya tidak berhasil maka dengan sendirinya juga kebijakan itu tidak mampu menampilkan hasil yang maksimal. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan pemahaman yang mumpuni terkait dengan studi kebijakan yang pada perkembangan keilmuwanannya sudah mengarah kepada dua perspektif utama yaitu Perspektif Administrasi Publik dan Perspektif Politik.

Menurut Nugroho (Yulianto, 2015) untuk mengimplementasikan kebijakan terdapat dua pilihan langkah : Mengimplementasikan secara langsung dalam bentuk uraian program, dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut pada dua langkah tersebut, agar kebijakan bisa dijlankan maka seharusnya pula memperhatikan bentuk program yang realis, sehingga dapat mempengaruhi kepentingan publik. Menurut Van Metter dan Van Horn (Yulianto, 2015) mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai suatu aktifitas dalam upaya untuk mencapai kinerja. Dalam hal ini mereka menampilkan korelasi dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari kebijakan. Kinerja

BAB

7

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI SKPP TINGKAT MENENGAH

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dalam suatu model kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan suatu kinerja dapat diukur pada tingkat keberhasilannya dari ukuran serta tujuan kebijakan tersebut yang memiliki sifat realistis dengan sosio-kultur yang berada pada level pelaksana kebijakan. Jika ukuran serta sasaran kebijakan tersebut terlalu memiliki sifat yang ideal (utopis), maka dari itu akan cukup sulit direalisasikan. Selain itu menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:164) berpendapat bahwa dalam pengukuran kinerja implementasi kebijakan tentunya ditegaskan pada standar serta sasaran tertentu yang diharuskan untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, suatu kinerja dalam kebijakan pada dasarnya yaitu penilaian atas peningkatan standar serta sasaran yang telah tercapai. Di dalam Suatu standar serta tujuan kebijakan pemahaman tentang maksud umum merupakan hal yang penting.

Implementasi kebijakana bisa saja gagal (*frustrated*) jika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami terhadap suatu standar serta tujuan kebijakan. Sikap para pelaksana standar dan kebijakan memiliki hubungan yang cukup erat satu sama lain. Disposisi para pelaksana memiliki "penting" dan arah menuju standar dan tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006 :164), pelaksana mungkin gagal untuk mewujudkan atau mematuhi tujuan kebijakan yang dinyatakan.

BAB

8

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketiga materi yang menjadi sub-fokus/indikator program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah seperti pembangunan karakter, pengawasan pemilu dan partisipasi pengawasan serta penegakan hukum pemilu disampaikan oleh orang-orang yang cukup berkompeten pada bidangnya. Sehingga berdampak pada eksistensi alumni peserta SKPP dengan ikut mengawal pemilu melalui komunitas, jejaring pengawas partisipatif serta lembaga penyelenggara pemilu seperti pengawas kecamatan. Dengan kata lain, SKPP Tingkat Menengah memberi dampak positif bagi para peserta secara khusus, dan pelaksanaan pengawasan pemilu di Sulawesi Utara.
2. Secara keseluruhan, Implementasi Kebijakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif berjalan dengan baik. Mulai dari persiapan hingga proses pelaksanaan. Penyelenggara, narasumber dan fasilitator adalah orang-orang kompeten dibidangnya. Adapun faktor penghambat implementasi SKPP Tingkat Menengah ada pada proses pelaksanaan dimana kendala teknis seperti disiplin waktu menjadi faktor dominan. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah sosialisasi kegiatan yang kurang optimal melalui sosial media karena hanya mampu menjangkau daerah yang mudah akses jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan, Afifuddin, M., Pettalolo, R. D., Siregar, F. E., Bagja, R., Suswantoro, G, Masmulyadi. (2020). *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badrun, Ubedilah. 2020. Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu Dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*-hal 53.
- Bawaslu Provinsi Sulut, 2021. *Modul Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Tingkat Menengah*.
- Budi Wainarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ferdian, Muhammad dkk. 2021. Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor, 6109.
- Iskandar, Fuat. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret). Tesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi Dan Kebijakan Pendidikan- Jakarta.
- Junaidi, Veri. 2013. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF).

- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Kebijakan Publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia*.
- Kadji, Yulianto. 2017. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta dan Realitas*. Gorontalo. UNG Press Gorontalo.
- Laporan Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Bawaslu RI. 2021
- Laporan Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
- Modul Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Tingkat Menengah. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Tahun 2021.
- Nursaiti, Muhammad Prima Ersya, Al Rafni, Yusnanik Bakhtiar. 2022. Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education* Volume 5 Nomor 2, Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Primadi, Agam dkk. 2019. Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan) *JPI: Jurnal of Political Issues Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Universitas Bangka Belitung Volume 1 | Nomor 1 | Juli 2019.
- Puadi. 2020. Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada 2020, Mewujudkan Pilkada Demokratis. *Jurnal Pengawasan Pemilu* Provinsi DKI Jakarta-hal 73.
- Rakhman, Sitti. 2020. Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengawasan Pemilu* Provinsi DKI Jakarta-hal 5.
- Sahya, Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.

- Saufi, Ahmad dkk. 2020. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19. *Society* <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES> Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, hal. 486-500
- Subarsono, A. G. 2005. "*Analisis Kebijakan Publik*" (*Konsep, Teori dan Aplikasi*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Syahrudin. 2009. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Di Kabupaten Karawang*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia-Jakarta.
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik UGM Yogyakarta.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Fitri Herawati Mamonto, S.Ag., M.A.P.

Lahir di Kotamobagu, 30 April 1977. Adalah dosen tetap di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Administrasi Negara Universitas Negeri Manado. Bergelar Sarjana (S1) Hukum Islam IAIN Manado, Magister (S2) Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, dan Doktor (S3)

Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Pernah mengikuti pendidikan Short Course on Social Science Research Methodology Northern Illinois University Dekalb Chigago USA dan International Journal of Academic Research (Thomson ISI Knowledge): The Professionalism of Regional Electoral Commission. Selain aktif mengajar dan meneliti, juga aktif dalam organisasi, antara lain: Wakil Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI SULUT) dan Wakil Ketua Aisiyah Sulut, Selain itu, dari tahun 2011 - sekarang, sangat aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan Pemilu dan Birokrasi Pemerintahan. Antara lain, tahun 2023 ini, menjadi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Narasumber TVRI Perempuan dan Pemilu 2024, dan Fasilitator Nasional Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.



Anggray Sari Mokoginta, S.P., M.A.P.

Lulus gelar Sarjana (S.P) pada tahun 2006 dan memperoleh gelar Magister bidang Administrasi Publik (M.A.P) tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Sulut. Selain itu, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 PW Fatayat NU Sulut PMII.